

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Harsono, Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hidayatulloh, Agus. 2013. *Alwasim Al-Qur'an Tajwid*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Santoso, Urip. (2012). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Syah, Mudakir Iskandar. (2019). *Panduan Mengurus Sertifikat & Penyelesaian Sengketa Tanah*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

### Jurnal

- Absori, dkk. (2022). Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Dalam Perspektif Reformasi Agraria. *Madani: Jurnal Masyarakat Sipil Indonesia*, 4 (1), 26-32.
- Arba. Any Suryani., dan Galang Asmara. (2021). Sistem Pendaftaran Tanah Yang Berlaku Di Indonesia. *PEPADU*, 3, 395-401.
- Ardiansyah, Galang Mahendra. Dewa Gede Sudika Mangku., dan Ni Putu Rai Yuliartini. (2022). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Sertifikat Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Sengketa Tanah Di Kelurahan Klatak Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Komunikasi Yustisia*, 5 (2), 260-270.
- Bangsawan, Moh. Indra dan Absori. (2019). Kebijakan Sertifikasi Tanah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1-14.
- Beritno, Pratomo. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(1), 682-707.
- Chandra, Rendra Onny Fernando. (2020). Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah Menurut Pp No.24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(3), 358-371.
- Dewandaru, Prasetyo Aryo. Nanik Tri Hastuti., dan Fifiana Wisnaeni. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional. *NOTARIUS*, 13 (1), 154-169.
- Dimas, Rionald. (2021). Publikasi Pendaftaran Tanah Di Negara Indonesia Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum. *SERINA III*, 209-216.
- Erfamiati, Alifia Devi. Komang Febrinayanti Dantes., dan Si Ngurah Ardhya. (2022). Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Terhadap Kepemilikan Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem. *e-Journal Komunikasi Yustisia*, 5 (2), 431-449.

- Hartana, Herry Jaya. I Made Suwitra., dan Ida Ayu Putu Widiati. (2019). Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 1 (3), 294-299.
- Hasan, Slamet Yusuf. Weny Almoravid Dunga., dan Suwitno Yutye Imran. (2023). Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah. *Journal of Comprehensive Science*, 2 (6), 1521-1531.
- Kholis, Nur dan Galih Bagas Soesilo. (2023). Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah Terhadap Kepemilikan Sertifikat Ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2 (2), 1-20.
- Lubis, Sakban. (2019). Pandangan Islam Terhadap Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Perdata. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 7 (7), 11-26.
- Ningsih, Nifantri Mulya. Marthinus Johane Saptanno., dan Sherlock Halmes Lekipiouw. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (5), 532-538.
- Perdana, Septivany Christa. (2018). Sertifikat Ganda Pada Proyek Pembangunan Rumah Susun (*Double Certificate Problem in Condominium Project*). *Jurnal Legal Reasoning*, 1 (1), 68-80.
- Prayoga, Agusti dan Moh. Indra Bangsawan. (2022). Pengaturan Kepemilikan Tanah sebagai Rangka Objek Penetapan Reforma Agraria. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 14-25.
- Putra, Z dkk. (2023). Perspektif Hukum Tentang Sertifikat Ganda. *ATHENA*, 1 (1), 22-25.
- Radina, Thania Audria. Nur Adhim., dan Triyono. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Overlapping Melalui Proses Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang). *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 10 (2), 505-518.
- Rahmawati, Ulfah Dwi dan Moh. Indra Bangsawan. (2022). Urgensi Kebijakan Satu Peta untuk Menyelesaikan Tumpang Tindih Penggunaan Lahan. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*. 42-59.
- Ramadhan, Faisal Fajar. Antik Bintari., dan Aditya Candra Lesmana. (2020). Administrasi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung Untuk Menangani Kasus Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah Di Kota Bandung Tahun 2020. *JANITRA (JURNAL ADMINISTRASI PEMERINTAHAN)*, 2(1), 55-69.

- Ramadhani, Rahmat. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 31-40.
- Ricky dan Sryani Br G. (2020). Akibat Hukum Sertifikat Ganda Dalam Hukum Pertanahan Indonesia. *Jurnal Law Pro Justitia*, V (2), 25-41.
- Rizki, K dkk. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dengan Terbitnya Sertifikat Ganda Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. *AKTUALITA*, 3(1), 688-704.
- Salim, Agus. (2019). Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 174-187.
- Saputra, Roki Arnanda. Syifa' Silviana., dan Emir Fabrian Marino. (2021). Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Ganda Serta Bentuk Kepastian Hukumnya. *Jurnal Jentera*, 4 (2), 555-573.
- Setiawati, Diana dkk. (2023). Penyuluhan Mengenai Pentingnya Pembuatan Akta Otentik Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Desa Daleman. *Borobudur Journal on Legal Services*, 4 (1), 1-7.
- Simanjuntak, Enrico. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16 (1), 84-104.
- Taqiyyah, Maya Anas dan Atik Winanti. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (1), 77-93.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

### **Website**

- Abror, M. (2022). <https://islam.nu.or.id/syariah/mafia-tanah-menurut-islam-kerugian-dunia-dan-akhirat-v6gSO>, diakses tanggal 16 September 2023.
- Admin. (2017). <https://kantorpengacara-ram.com/jenis-jenis-sengketa-pertanahan/>, diakses tanggal 03 Oktober 2023.

- Bramantyo. (2022). <https://karanganyar.inews.id/read/59219/sertifikat-tanah-ganda-di-colomadu-warga-boyolali-ngadu-pada-kejaksaan-negeri-karanganyar>, diakses tanggal 25 September 2023.
- Damar. (2021). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210422063821-12-633131/eks-walkot-semarang-gugat-bpn-soal-sertifikat-tanah-ganda>, diakses tanggal 18 September 2023.
- Haryanti, R. (2018). <https://properti.kompas.com/read/2018/12/28/174424421/kal-aidoskop-2018-kasus-pertanahan-aduan-eko-hingga-gugatan-handoko?page=all>, diakses tanggal 14 September 2023.
- Idris, M. (2023). <https://amp.kompas.com/money/read/2023/09/13/063434426/sejarah-konflik-lahan-pulau-rempang-bermula-dari-pemberian-hpl-ke-swasta>, diakses tanggal 16 September 2023.
- Irawan, D. (2017). <https://www.infojambi.com/4843-2>, diakses tanggal 25 September 2023.
- Rachmawati.(2021).<https://regional.kompas.com/read/2021/09/29/092900778/nurul-kaget-sertifikat-tanahnya-digandakan-perangkat-desad-didijadikan>, diakses tanggal 25 September 2023.
- Trisetiawan, A. (2020). <https://solo.tribunnews.com/2020/01/21/endus-adanya-dugaan-sertifikat-ganda-bpn-sukoharjo-lakukan-investigasi-di-mojorejo>, diakses tanggal 25 September 2023.
- <https://kbbi.web.id/magersari>, diakses tanggal 18 Oktober 2023.
- <https://siplawfirm.id/mengenal-perbedaan-arbitrase-mediiasi-dan-konsiliasi/?lang=id>, diakses tanggal 05 November 2023.
- <https://pengacaradannotaris.com/perbedaan-mediiasi-dan-arbitrase.html>, diakses tanggal 05 November 2023.